

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL : SUATU STUDI PADA KABUPATEN NIAS SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Silvanus Kevin Sandro Harita

NPP. 29.0165

*Asdaf Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara*

*Program Studi Kebijakan Publik*

Email: 29.0165@praja.ipdn.ac.id

**ABSTRACT (in english)**

**Problem Statement/Background (GAP) :**Tahun 2015, South Nias was designated as a disadvantaged area through Presidential Decree Number 131 of 2015 concerning the Determination of Disadvantaged Areas in 2015-2019. Then in 2020, South Nias was re-established as a disadvantaged area through Presidential Decree Number 63 of 2020 concerning the Determination of Disadvantaged Areas in 2020 - 2024. Ini indicates that the implementation of the policy of accelerating the development of disadvantaged areas in South Nias has not been fully implemented properly. **Purpose :**The purpose of this research analyzes and describes the implementation of policies to accelerate the development of disadvantaged areas and strategies in accelerating the development of disadvantaged areas in South Nias Regency. **Method :**This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. The data sources of this research are primary and secondary data sources. The data analysis techniques used are Miles and Huberman data analysis techniques and SWOT matrices. **Result :** As a result of the findings, the implementation of the policy of accelerating the development of disadvantaged areas in South Nias has not been fully well. The biggest obstacle experienced by South Nias is the limited resources owned, especially the budget. Based on the SWOT matrix, the strategy in accelerating the development of disadvantaged areas in South Nias is to Encourage the cooperation of various parties in the progress of development in South Nias Development of facilities and infrastructure (infrastructure), Expanding the region, Increasing income and community welfare through local economic development, Improving the quality of human resources through Education, Training and technological knowledge. **Conclusion :**The conclusion of this study is that the policy implementation of accelerating the development of disadvantaged areas has not been going well and the South Nias regency government can use the WO strategy that minimizes weaknesses and takes advantage of existing opportunities. In order to accelerate regional development, the South Nias regional government is encouraged to implement the strategy drawn up.

**Keywords:** Policy Implementation, Strategy, Acceleration of Development, Disadvantaged Areas

## ABSTRAK (in bahasa)

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Tahun 2015, Nias Selatan ditetapkan sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kemudian tahun 2020, Nias Selatan ditetapkan kembali sebagai daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal tahun 2020 – 2024. Ini mengindikasikan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan belum sepenuhnya terlaksana baik. **Tujuan:** Tujuan Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan strategi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nias Selatan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data Miles dan Huberman dan matriks SWOT. **Hasil/temuan :** implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan belum sepenuhnya berjalan baik. Kendala terbesar dialami Nias Selatan adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki terutama anggaran. Berdasarkan matriks SWOT, strategi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan yakni Mendorong kerjasama berbagai pihak dalam kemajuan pembangunan di Nias Selatan Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur), Melakukan pemekaran wilayah, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, Pelatihan serta pengetahuan teknologi. **Kesimpulan:** implemmentasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal belum berjalan dengan baik dan pemerintah kabupaten Nias Selatan dapat menggunakan strategi WO yang meminimalisir kelemahan dan memanfaatkan peluang yang ada. Guna percepatan pembangunan daerah, pemerintah daerah Nias Selatan disarankan untuk mengimplementasikan strategi yang disusun.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Strategi, Percepatan Pembangunan, Daerah Tertinggal

### I. PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Pembangunan menjadi komponen penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembangunan dapat menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Saat ini, Indonesia terus menerus menggalakkan pembangunan. Banyak kebijakan dan program yang sedang dan telah dilaksanakan oleh pemerintah, bahkan sekarang ini salah satu arah kebijakan pemerintah berfokus terhadap pembangunan infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini dilakukan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.

Rangkaian pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah melalui setiap program dan rencana aksi yang sudah disusun sedemikian rupa, pada umumnya berfokus terhadap bagaimana peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Menurut Sugiharto (2008), pembangunan adalah proses peningkatan kualitas hidup suatu negara secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa perekonomian menjadi komponen penting yang tidak dapat dilepaskan dari pembangunan. Melalui pelaksanaan pembangunan, tentunya memberikan stimulus terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, ketika ekonomi mengalami peningkatan, masalah seperti kemiskinan, pengangguran, kehidupan yang tidak layak dapat diatasi.

Sebagaimana diketahui, Indonesia ialah negara yang terdiri dari banyak pulau. Saat ini, terdapat 34 provinsi dan 514 Kabupaten/Kota yang tersebar di Indonesia, hal ini membuat beban dan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangatlah besar. Pelaksanaan pembangunan yang berjalan selama ini di Indonesia, awalnya dilakukan secara sentralistik atau terpusat. Kemudian pada era reformasi pada tahun 1998 paradigma pembangunan ini beralih dari yang sentralistik menjadi desentralistik, dimana pemerintah daerah berhak menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan karakteristik dan kekhasan daerahnya. Hal ini membuat beban pemerintah pusat menjadi berkurang dan pemerintah daerah dapat melaksanakan pembangunan lebih leluasa sesuai dengan keperluan dan kemampuan yang dimiliki oleh daerah.

Implikasi dari otonomi daerah membuat pemerintah daerah harus mampu adaptif dan memiliki kesiapan dalam menata dan mengurus daerahnya sendiri. Kesiapan pemerintah daerah atas kondisi daerah tentunya akan membawa sisi positif dalam kemajuan daerahnya. Tetapi dilain sisi, adanya ketidaksiapan ini justru menjadi bumerang bagi daerah sendiri yang bisa berdampak terhadap lambatnya pembangunan dan bahkan membuat daerah menjadi tertinggal. Sudah 75 tahun lamanya negara Republik Indonesia merdeka dan Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah banyak mengerjakan pembangunan di berbagai aspek, tapi sejauh ini negara kita belum mengalami kemajuan yang signifikan dan masih tergolong sebagai negara berkembang. Bahkan proses pembangunan yang berjalan selama ini, justru menimbulkan masalah lain yakni terjadinya ketimpangan antar wilayah dimana beberapa daerah sudah mengalami kemajuan dalam pembangunan dan beberapa daerah lainnya masih tertinggal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dimaksud dengan daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal, Kabupaten Nias Selatan ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Kondisi yang dialami oleh Nias Selatan cukup memprihatinkan. Sejak ditetapkannya Nias Selatan sebagai daerah tertinggal pada tahun 2015 yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 hingga ditetapkan lagi sebagai daerah tertinggal pada tahun 2020 melalui Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024, mengindikasikan bahwa pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Oleh karena itu perlu ditinjau sejauh mana pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan serta strategi apa yang tepat untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah Nias dalam percepatan pembangunan sehingga Nias Selatan terlepas dari status daerah tertinggal.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Daerah tertinggal adalah daerah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal memuat penjelasan tentang kriteria suatu daerah tertinggal antara lain perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Pada umumnya, pembangunan ekonomi di Nias Selatan menunjukkan peningkatan. Meskipun mengalami peningkatan, pembangunan ekonomi tersebut masih tergolong rendah pada level provinsi maupun nasional. Kemudian data BPS Nias Selatan pada tahun 2020 menunjukkan persentase

penduduk miskin di Nias Selatan sebesar 16,74 %. Angka persentase kemiskinan ini cukup tinggi bila dibandingkan dengan daerah lain. BPS Sumatera Utara mencatat , persentase penduduk miskin di Nias Selatan pada tahun 2020 menempati urutan ke-3 tertinggi dari 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Kondisi infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan cukup memprihatinkan. Banyaknya akses jalan yang rusak membuat masyarakat kesulitan dalam kelancaran lalu lintas. Kemudian masih terdapatnya daerah-daerah di Kabupaten Nias Selatan yang belum tersentuh pembangunan secara maksimal terutama yang berada di daerah pegunungan. Daerah ini menjadi tertutup karena akses yang sulit dimana kondisi jalan sulit dan tidak dapat dilalui oleh kendaraan. Bahkan masih ada daerah yang jaringan telekomunikasi maupun ketersediaan listriknya belum ada.

Dari sisi kualitas sumber daya manusia, pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nias Selatan semakin baik, yang mana terdapat peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun. Dari angka IPM pada tahun 2015 yang hanya mencapai 58,74 menjadi 61,89 pada tahun 2020. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten lain dimana Nias Selatan menempati urutan ke 2 terendah dari 33 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Utara.

Dari sisi kemampuan anggaran, yang menunjukkan bagaimana tingkat kemampuan suatu daerah dalam pembiayaan setiap program dan kegiatannya secara mandiri. Berdasarkan data didapat melalui RPJMD Nias Selatan tahun 2016-2021, komponen pendapatan daerah Kabupaten Nias Selatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan lain-lain daerah yang sah. Dalam kurun waktu 2011-2015 Pendapatan Daerah terbesar berasal dari Dana Perimbangan dengan kontribusi rata-rata mencapai 85,02 persen, diikuti oleh Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar 11,7 persen dan rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah merupakan yang terkecil, yakni hanya sebesar 3,3 persen. Penyumbang terbesar dalam komponen dana perimbangan selama kurun waktu 2011-2015 yaitu Dana Alokasi Umum sebesar 66 persen dari total pendapatan, Dana Alokasi Khusus 13,8 persen, Dana Bagi Hasil Pajak 2,7 persen dan terakhir Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar 2 persen. Data-data tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam hal pendanaan kegiatan di Kabupaten Nias Selatan

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penulis menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan terhadap penelitian ini, walaupun terdapat beberapa perbedaan seperti lokus penelitian, metode yang digunakan, dan judul penelitian, namun menurut peneliti, masih berkaitan dengan penelitian yang peneliti laksanakan. Penelitian Abdul Wahid pada tahun 2006 tentang *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal (studi kasus Kabupaten Garut, provinsi Jawa Barat)*, menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa pemerataan di kabupaten Garut belum berhasil sehingga perlu kebijakan yang adil dan transparan. Penelitian Almasdi Syahza dan Suarman pada tahun 2013 tentang *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, dengan menggunakan survei dengan metode perkembangan, menjelaskan bahwa strategi yang tepat untuk pembangunan di daerah Meranti yang mempunyai peluang dengan mengembangkan pertanian menjadi agribisnis dan agroindustri. Ahmad Yusuf Rangkuti melakukan penelitian pada tahun 2017 tentang Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model studi kasus, hasil penelitian

menunjukkan perlu ditingkatkannya Kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang diwujudkan dalam suatu kebijakan pembangunan. Penelitian Annisa Alifa Ramadhani, Toto Gunarto dan Arivina Ratih Taher pada tahun 2018 tentang *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat*, dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa target pembangunan yang harus diprioritaskan adalah membangun infrastruktur pendukung pertanian untuk mengembangkan kawasan pusat komoditas unggulan. Kemudian penelitian Lailatis Syarifah pada tahun 2018 tentang *Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Di Kecamatan Gunung Wungkal*, dalam hasil penelitian menyebutkan bahwa strategi yang tepat untuk mempercepat pembangunan kawasan Gunungwungkal adalah dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat agar dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi dan peningkatan infrastruktur.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Nias Selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, terdapat pada lokus dan fokus penelitian. Penulis membahas penelitian tentang implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten Nias Selatan. Yang dimana lokus nya berada di Nias Selatan dengan berfokus pada pelaksanaan kebijakan dan perumusan strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal. Dengan menggunakan metode kualitatif, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan dan strategi yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal kabupaten Nias Selatan.

#### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan. Kemudian juga bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nias Selatan.

## **II. METODE**

Pendekatan yang dipakai oleh penulis dalam penelitian tentang Implementasi Kebijakan dalam Percepatan Pembangunan daerah Tertinggal di Kabupaten Nias Selatan menggunakan penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan penelitian dilaksanakan secara mendalam berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dan data lapangan diungkapkan melalui kegiatan wawancara maupun kajian terhadap dokumen yang kemudian mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, aktual dan akurat sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Bappeda Nias Selatan, Kepala BPKPAD Nias Selatan, Kepala BKD Nias Selatan, Kabid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Nias Selatan, Kabid Perencanaan dan Evaluasi Program Bappeda Nias Selatan, Kabid Kesejahteraan Sosial dan Budaya Bappeda Nias

Selatan, Kabid Sarana Prasarana Bappeda Nias Selatan, Kabid Perekonomian Bappeda Nias Selatan, dan Kabid Pendapatan Asli Daerah BPKPAD Nias Selatan

Dalam penelitian ini, menggunakan dua teknik analisis yakni analisis data kualitatif Miles dan Huberman untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nias Selatan yang menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Kemudian juga menggunakan matriks SWOT untuk merumuskan strategi yang dilakukan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Nias Selatan.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis dalam penelitian ini menganalisis tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Nias Selatan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Edward III. Kemudian juga menganalisis tentang strategi yang dilakukan dalam percepatan pembangunan di Nias Selatan dengan menggunakan analisis SWOT.

Dalam teori implementasi kebijakan menurut Edward III terdapat 4 dimensi yang dapat mengukur keberhasilan suatu implementasi yakni komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Adapun pembahasan tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Nias Selatan dapat dilihat pada subbab berikut.

#### **3.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan, ide, atau berita dari komunikator kepada komunikan sehingga komunikan mengerti maksud dari pesan atau berita itu. Keberhasilan suatu tujuan dapat tercapai dengan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi menjadi faktor penting dikarenakan berguna dalam mengetahui petunjuk dan arah dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi merupakan metode penerjemahan aturan yang ada menjadi sebuah informasi oleh pimpinan, yang kemudian informasi tersebut disampaikan kepada bawahannya ataupun pelaksana untuk segera dilaksanakan sesuai dengan yang tertera pada aturan guna mencapai tujuan. Jika terjadi kesalahan penerjemahan aturan maupun kesalahan penyampaian kepada bawahan/pelaksana, maka tujuan yang telah ditulis tidak dapat tercapai dengan baik.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dapat dipahami bahwa untuk proses komunikasi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan sudah dilakukan dengan baik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nias Selatan sudah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan seluruh *stakeholder* utamanya para kepala OPD Nias Selatan untuk mempedomani Stranas PPDT.

#### **3.2. Sumber Daya**

Sumber daya menjadi faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan karena sumberdaya yang berkompeten dan baik akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang baik. Dengan adanya sumber daya yang tersedia dapat mempermudah atau justru mempersulit proses pelaksanaan suatu kebijakan. Jika sumber daya yang tersedia mencukupi maka akan mempermudah pelaksanaan kebijakan namun apabila sumber daya yang tersedia tidak mencukupi maka akan menghambat proses pelaksanaan kebijakan khususnya dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal. Sumberdaya yang dimaksud sini yaitu kualitas sumber daya manusia yang menjadi pelaku utama dalam pelaksanaan sebuah kebijakan yang ada, didukung dengan sumberdaya pendukung berupa sarana prasarana yang dapat membantu pekerjaan manusia tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis, untuk kualitas sumber daya manusia yang ada di Nias Selatan masih tergolong rendah. Laporan Badan Pusat Statistik Nias Selatan dalam Statistik Daerah Nias Selatan 2021 menjelaskan bahwa penduduk Nias Selatan lebih banyak berstatus sebagai pekerja keluarga. Tingkat Pendidikan Angkatan kerja Nias Selatan relatif banyak yang belum atau tidak menamatkan Pendidikan SD. Semakin tinggi jenjang Pendidikan, maka semakin sedikit penduduk yang bersekolah. Keadaan ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia di Nias Selatan belum bisa dibilang baik dan ini juga terdapat pada aparatur pemerintahan di Nias Selatan sebagai pelaksana kebijakan. Tidak hanya dari sisi kualitas, untuk jumlah sumber daya aparatur yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan keahlian juga masih belum terpenuhi.

Dari sisi ketersediaan anggaran yang dimiliki Nias Selatan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Kepala BPKPAD Nias Selatan, Bapak Aferili Harita, SE pada hari senin tanggal 24 Januari 2022 bertempat di ruang kerja kepala badan kantor BPKPAD, beliau menuturkan bahwa

“Anggaran yang dimiliki Nias Selatan saat ini masih terbatas. Bahkan Nias Selatan masih sangat bergantung dengan pusat, hampir semua anggaran Nias Selatan berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Anggaran yang terbatas ini membuat pemerintah merasa kesulitan dalam membiayai keseluruhan program program yang sudah direncanakan”

Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah, Bapak Budiman S. Hulu, SE pada hari jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di ruang kerja kepala bidang kantor BPKPAD, beliau menuturkan bahwa

“Kecilnya anggaran yang dimiliki Nias Selatan membuat pemerintah daerah Nias Selatan terbatas dalam melaksanakan pembangunan. Bahkan dari sisi pendapatan, PAD Nias Selatan masih kecil, hanya menyumbang 2% dari keseluruhan anggaran yang dimiliki Nias Selatan.”

Dari hasil temuan ini dapat dipahami bahwa dari ketersediaan anggaran yang dimiliki Nias Selatan masih belum memenuhi. Hal ini membuat pemerintah dalam melaksanakan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal belum maksimal.

Menurut Edward III sumberdaya lain yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan adalah sarana prasarana yang tersedia. Sarana prasarana sangat mendukung dalam pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal. Untuk sarana dan prasarana di Nias Selatan menurut pengamatan penulis di lapangan masih belum lengkap. Masih banyak fasilitas yang belum tersedia dan masih terbatas.

Dari penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa sumber daya yang ada di Nias Selatan masih belum terpenuhi. Keadaan ini tentunya menjadi kendala atau penghambat dalam implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kabupaten Nias Selatan.

### **3.3. Disposisi**

Disposisi menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan karena disposisi sendiri merupakan keinginan, kecenderungan, dan kemauan para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang ada. Disposisi ini melihat kesungguhan/niat dari para pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut dapat dicapai. Dalam disposisi sendiri menurut Edward III memiliki faktor yang menjadi harus perhatian yakni pengangkatan birokrasi

Pengangkatan birokrasi menjadi hal yang penting karena jika pengangkatan birokrasi tidak berjalan dengan baik maka orang orang yang terpilih adalah orang orang yang salah yang tidak mau menjalankan kebijakan yang ada, dan tentunya akan terjadi hambatan-hambatan yang akan menimbulkan permasalahan di masyarakat. Oleh karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel

pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang ditetapkan, lebih khusus lagi yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang melibatkan seluruh *stakeholder* utamanya Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berusaha semaksimal mungkin memilih orang yang terbaik dalam pelaksanaan kebijakan meskipun dengan segala keterbatasan yang ada mengingat kondisi kualitas dan kuantitas masyarakat nias selatan yang kompeten masih sedikit. Hal ini berdasarkan wawancara penulis dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Anarota Ndruru pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 melalui panggilan *whatsapp*, beliau menuturkan bahwa

“Birokrat berperan penting dalam melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengangkatan birokrat mulai dari staf hingga pimpinan jabatan, pemerintah daerah Nias Selatan melakukan berdasarkan seleksi yang sudah ditetapkan dan menggunakan sistem merit. Kualitas dan kompetensi menjadi hal yang sangat utama dalam hal perekrutan birokrasi ini. Cuman dalam kenyataan di lapangan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan kembali seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di Nias Selatan. Sehingga ketika ada yang tidak memenuhi sesuai kompetensi atau bidang keahlian, pemerintah mengangkat berdasarkan orang-orang yang memiliki dedikasi dan kesungguhan dalam bekerja.”

Selain pengangkatan birokrasi, adanya pemberian insentif khusus guna meningkatkan kinerja yang diberikan kepada pelaksana kebijakan menjadi salah satu analisis penelitian dalam upaya pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal pada kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis didapat bahwa belum ada insentif tambahan untuk pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan. Tetapi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan memberikan reward bagi pegawai pemerintah yang berprestasi dan berkinerja tinggi. Dengan adanya reward ini dapat mempengaruhi semangat kerja para pegawai pemerintah untuk memberikan kontribusi yang lebih dalam pembangunan daerah Nias Selatan.

### **3.4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi ini menjadi sebuah aturan yang memberikan kejelasan pembagian tugas bagi setiap bagian yang terlibat. Struktur birokrasi juga memberikan kejelasan kewenangan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar instansi terkait pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya kejelasan kewenangan maka akan terjadi keselarasan dalam pelaksanaan tugas sehingga akan memperlancar jalannya kebijakan dan mempercepat pencapaian tujuan kebijakan yang ada.

Pada kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan, struktur birokrasi yang baik sangat diperlukan karena percepatan pembangunan daerah tertinggal ini merupakan salah satu program nasional sehingga dalam pengelolaannya memerlukan pembagian tugas dan kewenangan yang baik antar pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah kabupaten itu sendiri. Hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Nias Selatan, Bapak Abdiel Sonasa Amazihono, S.STP, M.Ec.Dev pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 bertempat di ruang kerja kepala badan kantor Bappeda yang menuturkan bahwa

”Secara hukum, sudah jelas diatur dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa daerah memiliki kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Dalam kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah daerah Nias Selatan menjadi pelaksana langsung dari kebijakan tersebut yang melibatkan seluruh OPD di Nias Selatan sesuai dengan program-program

percepatan pembangunan yang telah ditetapkan. Contohnya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka ini menjadi tugas dan tanggung jawab dari Dinas Pendidikan Nias Selatan. Dilain sisi dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sangatlah berguna untuk percepatan pembangunan ini salah satunya dalam hal anggaran.”

Dengan demikian untuk struktur birokrasi dalam hal ini kewenangan sudah diatur dengan jelas bahwa pemerintah kabupaten Nias Selatan menjadi pelaksana langsung dari kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal, dengan melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang pembagian tugasnya berdasarkan tupoksi masing masing dan disesuaikan dengan program percepatan pembangunan apa yang dikerjakan.

### 3.5. Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Nias Selatan

Perumusan strategi yang dilakukan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan menggunakan analisis SWOT.

**Tabel 1. IFAS ( Internal Factor Analysis System)**

No	Faktor Internal	Bobot	Rating	Skor
	<b>Kekuatan</b>			
1	Memiliki wilayah berpotensi besar dalam pariwisata	0,08	3,62	0,31
2	Visi Misi Nias Selatan	0,06	2,50	0,15
3	Lahan pertanian yg subur	0,06	2,50	0,15
4	Potensi perikanan yang besar	0,06	2,87	0,19
5	Budaya gotong royong yg tinggi	0,05	2,37	0,13
6	Adanya dana desa	0,04	2,00	0,09
	Total	0,38		1,02
	<b>Kelemahan</b>			
7	Rendahnya Kualitas SDM	0,09	4,00	0,38
8	Sarana dan Prasarana kurang memadai	0,09	3,75	0,33
9	Minimnya anggaran	0,09	4,00	0,38
10	Perekonomian masyarakat rendah	0,08	3,50	0,29
11	PAD Rendah	0,09	4,00	0,38
12	Letak Wilayah Jauh dari Ibukota dan wilayah luas	0,06	2,62	0,16
13	Pola Pikir belum maju	0,08	3,50	0,29
	Total	0,60		2,21
	Total Keseluruhan	1,00		3,23

Sumber : data diolah peneliti, 2022

**Tabel 2. EFAS (Eksternal Factor Analysis System)**

No	Faktor Eksternal	Bobot	Rating	Skor
	Peluang			
1	Kemitraan dan Kerjasama dengan pihak swasta/lain	0,12	3,00	0,36
2	Perkembangan teknologi	0,13	3,37	0,45
3	Potensi Nias Selatan yang dapat dikembangkan	0,12	3,00	0,36
4	Kementerian yang bidangi pembangunan daerah tertinggal	0,09	2,37	0,22
5	Adanya otonomi daerah	0,07	1,87	0,14
	Total	0,54		1,53
	Ancaman			
6	Ancaman bencana alam	0,07	1,75	0,12
7	Minimnya kesadaran masyarakat akan potensi Nias Selatan	0,12	3,00	0,36
8	Persaingan dalam pengembangan Kawasan	0,13	3,37	0,45
9	Perubahan sosial ekonomi	0,13	3,25	0,42
	Total	0,45		1,35
	Total Keseluruhan	1,00		2,88

Sumber : data diolah peneliti, 2022

Berdasarkan hasil penghitungan skor pembobotan faktor internal, terlihat bahwa kekuatan memiliki bobot sebesar 0,381 dan kelemahan memiliki bobot sebesar 0,609. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kelemahan lebih dominan atau lebih banyak memberi pengaruh besar dalam internal Nias Selatan. Dilain sisi, hasil penghitungan skor pembobotan faktor eksternal, didapat bahwa peluang memiliki bobot sebesar 0,545 dan ancaman memiliki bobot sebesar 0,455. Hal ini menunjukkan bahwa peluang lebih dominan dalam memberikan pengaruh terhadap faktor eksternal Nias Selatan. Kemudian dilihat dari hasil penghitungan skor faktor internal dan eksternal, setelah bobot dan rating dikalikan, diperoleh nilai total skor faktor internal sebesar 3,23 yang menunjukkan Nias Selatan memiliki faktor internal yang kuat. Namun sayangnya lebih didominasi oleh aspek kelemahan, sehingga perlu penyesuaian strategi yang tepat dalam mengatasi kelemahan yang dimiliki Nias Selatan. Sedangkan nilai total skor faktor eksternal sebesar 2,88, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Nias Selatan mampu merespon dengan baik peluang dan ancaman dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan.

Berikut ini matriks SWOT Nias Selatan setelah dilakukan penggabungan aspek yang dimiliki sehingga menghasilkan alternatif strategi percepatan pembangunan di Nias Selatan.

**Tabel 3. Matriks SWOT Nias Selatan**

<p><b>Internal</b></p>	<p><b>Strength (Kekuatan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki wilayah yang berpotensi dalam pariwisata</li> <li>2. Visi Misi Nias Selatan yang ingin mewujudkan Nias Selatan maju, masyarakat sejahtera</li> <li>3. Lahan yang subur untuk pengembangan pertanian</li> <li>4. Memiliki potensi perikanan yang besar</li> <li>5. Budaya gotong royong masyarakat yang masih tinggi</li> <li>6. Adanya dana desa</li> </ol>	<p><b>Weakness (Kelemahan)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia</li> <li>2. Sarana dan prasarana yang kurang memadai</li> <li>3. Minimnya anggaran yang dimiliki daerah</li> <li>4. PAD yang rendah</li> <li>5. Perekonomian masyarakat yang masih rendah</li> <li>6. Letak wilayah yang jauh dari ibukota dan wilayah yang luas</li> <li>7. Pola pikir masyarakat yang masih belum maju</li> </ol>
<p><b>Eksternal</b></p> <p><b>Opportunities (Peluang)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemitraan dengan pihak swasta atau pihak lain</li> <li>2. Perkembangan teknologi</li> <li>3. Potensi yang dimiliki Nias Selatan yang dapat dikembangkan</li> <li>4. Adanya kementerian yang membidangi langsung pembangunan daerah tertinggal</li> <li>5. Adanya otonomi daerah yang memberikan kebebasan</li> </ol>	<p><b>Strategi S-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan akses kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi</li> <li>2. Meningkatkan kemitraan dengan pihak swasta guna mendorong masuknya investasi</li> <li>3. Mengoptimalkan penggunaan dana desa</li> <li>4. Mengoptimalkan pengembangan daerah wisata, sektor pertanian dan sektor perikanan</li> <li>5. Memanfaatkan teknologi dalam proses produksi hasil pertanian dan perikanan</li> </ol>	<p><b>Strategi W-O</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong kerjasama berbagai pihak dalam kemajuan pembangunan di Nias Selatan</li> <li>2. Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan</li> <li>3. Melakukan pemekaran wilayah</li> <li>4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui</li> </ol>

	6. Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah	pengembangan ekonomi lokal 5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, Pelatihan serta pengetahuan teknologi
<b>Threat (Ancaman)</b> 1. Adanya ancaman bencana alam 2. Minimya kesadaran masyarakat akan potensi besar yang dimiliki Nias Selatan 3. Persaingan dalam pengembangan kawasan 4. Perubahan sosial-ekonomi	<b>Strategi S-T</b> 1. Membangun database dan menerapkan deteksi dini akan terjadinya bencana alam 2. Membangun kawasan yang berbeda dari kawasan yang telah ada dan unik sehingga dapat menjadi daya tarik	<b>Strategi W-T</b> 1. Mengembangkan kawasan produktif dengan memperhatikan potensi daerah Nias Selatan, budaya, dan lingkungan 2. Meningkatkan pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat Nias Selatan 3. Edukasi program mitigasi bencana alam

Strategi – strategi yang telah tersusun dari matrik SWOT yang sudah dibuat tentunya dapat menjadi alternatif bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam percepatan pembangunan Nias Selatan untuk lepas dari status daerah tertinggal. Tetapi tentu ada keterbatasan dalam organisasi sehingga menyebabkan seluruh strategi tersebut tidak dapat diterapkan secara bersamaan, sehingga perlu diurutkan tingkat prioritas strategi berdasarkan tingkat kestrategisannya. Berdasarkan Matriks SWOT-4K posisi Kabupaten Nias Selatan berada di kuadran II sehingga menggunakan strategi yang meminimalisir kelemahan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki yakni strategi WO. Adapun strategi WO yang telah dirumuskan antara lain: mendorong kerjasama berbagai pihak dalam kemajuan pembangunan di Nias Selatan, Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan, Melakukan pemekaran wilayah, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, Pelatihan serta pengetahuan teknologi.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Nias Selatan tentunya ditujukan untuk melepaskan Nias Selatan dari status daerah tertinggal. Seperti yang diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan belum sepenuhnya berhasil. Terdapat beberapa kekurangan atau kelemahan yang menghambat pelaksanaan kebijakan ini. Sehingga diperlukan strategi yang tepat untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mempercepat pembangunan di Nias Selatan. Dalam temuan ataupun hasil

penelitian yang dilakukan oleh penulis setelah mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang kemudian menggabungkannya dengan menggunakan matriks SWOT didapat beberapa alternatif strategi dalam percepatan pembangunan daerah di Nias Selatan seperti pemerintah daerah perlu mendorong kerjasama dengan berbagai pihak dalam kemajuan pembangunan di Nias Selatan. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Yusuf Rangkuti pada tahun 2017 yang mana dalam strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Labuhanbatu, hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perlu ditingkatkannya Kerjasama yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten yang diwujudkan dalam suatu kebijakan pembangunan. Dari hal ini dapat dipahami bahwa Kerjasama menjadi salah satu kunci utama dalam pembangunan daerah. Selanjutnya, strategi lain yang dapat dilakukan adalah dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan serta pengembangan teknologi. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia akan berpotensi dalam mendorong percepatan pembangunan dan mengurangi ketertinggalan daerah. Hal ini juga diungkapkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Lailatis Syarifah pada tahun 2018, Ia mengungkapkan bahwa dengan meningkatkan kemampuan dan pengetahuan masyarakat dapat memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi dan peningkatan infrastruktur.

Banyak alternatif strategi yang disusun dalam penelitian ini untuk percepatan pembangunan di Nias Selatan baik itu Strategi SO, Strategi ST, Strategi WO, dan Strategi WT. Dalam penelitian yang dilakukan, penulis juga melakukan identifikasi terhadap posisi internal dan eksternal Kabupaten Nias Selatan berdasarkan matriks SWOT-4K. Yang mana hasil identifikasi ini menunjukkan bahwa dari lingkungan internal bernilai negatif yang berarti bahwa dalam lingkungan internal Kabupaten Nias Selatan, kelemahan dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal masih lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatannya. Sementara itu dari lingkungan eksternal bernilai positif yang berarti bahwa dalam lingkungan eksternal Kabupaten Nias Selatan, peluang yang dimiliki masih lebih dominan bila dibandingkan dengan adanya ancaman. Dengan keadaan posisi yang seperti itu, dimana kelemahan dan peluang lebih dominan, maka pemerintah Nias Selatan perlu menentukan strategi turn-around dengan meminimalisir kelemahan dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Strategi ini dikenal dengan istilah strategi WO.

### **3.7 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (opsional)**

Penulis menemukan permasalahan dalam dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal di Nias Selatan. Secara umum kebijakan maupun program yang direncanakan dan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Nias Selatan sudah berjalan baik dan membawa perubahan yang positif di daerah. Namun dalam evaluasi RPJMD yang dilakukan oleh Bappeda masih terdapatnya capaian kinerja pemerintahan yang belum terpenuhi. Bahkan melalui penelitian yang dilakukan, penulis memahami bahwa sebagai apapun kebijakan yang sudah disusun dan direncanakan, pada akhirnya itu akan disesuaikan kembali dengan anggaran yang dimiliki suatu daerah. Kebijakan percepatan pembangunan di Nias Selatan sudah terencana dengan baik dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Nias Selatan semampunya. Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik disebabkan adanya kendala yang dihadapi pemerintah dalam pelaksanaannya. Kendala terbesar yang dialami Nias Selatan dalam implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal terletak pada sumber daya yang dimiliki terutama anggaran. Tentunya dengan segala keterbatasan yang ada, pemerintah Nias Selatan perlu mengkaji lebih lanjut kebijakan pembangunan apa yang tepat dan prioritas untuk dilaksanakan di Nias Selatan

sehingga mampu memberi dampak yang cukup signifikan untuk mengejar ketertinggalan daerah Nias Selatan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi kebijakan percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Nias Selatan belum berjalan dengan baik hal itu dapat dibuktikan dengan kondisi perkembangan Nias Selatan yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain dan sejak tahun 2015 masih ditetapkan sebagai status daerah tertinggal. Kendala terbesar dalam implementasi kebijakan ini adalah sumber daya yang dimiliki Nias Selatan sangat terbatas baik itu dari sumber daya manusia, sarana prasarana dan anggaran. Dilain sisi, Strategi Kabupaten Nias Selatan yang tepat dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal yang dilakukan melalui analisis SWOT, dimana penulis merumuskan strategi yang sesuai dengan posisi kuadran Nias Selatan yang memiliki kelemahan namun punya peluang besar. Adapun strateginya antara lain: Mendorong kerjasama berbagai pihak dalam kemajuan pembangunan di Nias Selatan, Pembangunan sarana dan prasarana (infrastruktur) sebagai upaya untuk meningkatkan pembangunan, Melakukan pemekaran wilayah, Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal, Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan, Pelatihan serta pengetahuan teknologi.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan strategi yang telah disusun dalam percepatan pembangunan di Nias Selatan sehingga mengurangi ketertinggalan daerah.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan secara khusus Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nias Selatan yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

#### **V. DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmadi, Ruslam. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia
- Bappenas. 2015. *Laporan Perencanaan dan Pengendalian Strategi Pengembangan*
- Bappenas. 2015. *Program Pengembangan Wilayah Tertinggal*. Jakarta.
- BPS Nias Selatan. 2020. *Statistik Daerah Nias Selatan 2020*. Telukdalam
- BPS Nias Selatan. 2021. *Nias Selatan dalam Angka 2021*. Telukdalam
- BPS Sumatera Utara. 2021. *Provinsi Sumatera Utara dalam Angka 2021*. Medan
- Bungin, Burhan. 2008. Analisa Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Prenada Media Group
- Digdowniseiso, Kumba. 2019. Teori Pembangunan. Jakarta : Lembaga Penerbitan Universitas Nasional
- Djuwendah, E., Hapsari, H., Renaldy, E., & Saidah, Z. (2013). *Strategi pengembangan daerah tertinggal di Kabupaten Garut*. *Sosiohumaniora*, 15(2), 167-177

- Hamzah, L. M., & Agustin, E. (2020). *Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Tertinggal (Kabupaten Pesisir Barat)*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(3), 165-175.
- Hunger, J. David dan Thomas L. Wheelen. 2003. Manajemen Strategis. Yogyakarta : Ardi
- Ihsan, F., & Si, M. (2015). *Percepatan Pembangunan Daerah*. Online) <http://103.28>.
- Moleong, Lexy. J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosdakarya.
- Rangkuti, Freddy. 2018. Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI. Cetakan Keduapuluh Empat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu Sugi. 2004. *Landasan Teori dalam Pembuatan Kebijakan Pembangunan*. Jurnal Efisiensi Kajian Ilmu Administrasi UNY. Vol IV No 2 Agustus 2004, 132:15
- Ramadhan, A. A. (2018). *Strategi Pembangunan Daerah Tertinggal Di Kabupaten Lampung Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Lampung).
- Royanto, R., Idris, A., & Fitriyah, N. (2019). *Implementasi Pembangunan Infrastruktur dalam Percepatan Pembangunan Daerah Pedalaman di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau*. Jurnal Paradigma (JP), 8(1), 34-43.
- Sartika Ika, Dkk. 2015. Teori Pembangunan dan Implikasinya di Indonesia. Bandung : Pustaka Rahmat
- Setiono, A. (2019). *Strategi Pengembangan Daerah Tertinggal Dalam Upaya Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Kabupaten Pesisir Barat)* Skripsi (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung).
- Syarifah, L. (2018). *Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal di Kecamatan Gunung Wungkal*. Religi: Jurnal Studi Agama-agama, 14(1), 135-153.
- Syafri, Wirman dan P. Israwan Setyoko. 2010. Implementasi Kebijakan Publik dan Etika Profesi Pamong Praja. Sumedang: Alqa Prisma Interpelita.
- Suci, Rahayu. 2015. Esensi Manajemen Strategi. Sidoarjo : Zifatama Publisher
- Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. (2006). Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung.
- Wardoyo Paulus. 2011. 6 Alat Analisis Manajemen. Semarang : University Press
- Winarno, B. (2012). Kebijakan Publik Teori, Proses, Dan Studi Kasus. Yogyakarta: Medd Press.